

# Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening

Adilah Rahmah<sup>1\*</sup>, Rahmadhona Fitri Helmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

**Abstract:** Latar belakang penelitian ini adalah adanya masalah penyalahgunaan dana nagari oleh Wali Nagari yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengawasan keuangan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) memediasi pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penentuan sampel menggunakan *total sampling* sebanyak 52 responden. Instrumen penelitian adalah kuesioner dengan model skala likert (1-5). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif variable, uji asumsi klasik, *path analysis* dan regresi sederhana. Hasil penelitian membuktikan pengawasan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dalam memediasi pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari.

**Kata Kunci:** Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas laporan, Pemanfaatan TI

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.176>

\*Correspondence: Adilah Rahmah

Email: [adilahrhmh@gmail.com](mailto:adilahrhmh@gmail.com)

Received: 02-01-2025

Accepted: 12-02-2025

Published: 01-03-2025

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The background of this study is the problem of village fund management by the Village Mayor which is not in accordance with the regulations. The purpose of the study is to prove whether financial supervision carried out by the Pesisir Selatan District Inspectorate has an effect on the accountability of village government financial reports and the use of information technology as an intervening variable. The research method used is associative quantitative research. The sample determination used a total sampling of 52 respondents. The research instrument was a questionnaire with a Likert scale model (1-5). The data analysis techniques used were descriptive variable analysis, classical assumption tests, path analysis and simple regression. The results of the study prove that financial supervision has a partial effect on the accountability of village government financial reports. The use of information technology has no effect in mediating financial supervision on the accountability of village government financial reports.*

**Keywords:** *Financial Supervision, Accountability reports, Utilization of IT*

## Pendahuluan

Pengawasan keuangan negara di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah dapat diwujudkan dengan upaya menyampaikan laporan keuangan dengan rinci dan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dapat mencakup laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan evaluasi atas laporan keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa akuntabel dan transparan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan pimpinan disemua tingkatan daerah mampu mengelola penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien (Abdullah, 2022; Andriana, 2021; Clarke, 2021). Hal ini menjelaskan bahwa suatu instansi pemerintah dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi system pengelolaan keuangan daerah dengan melaporkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan memerlukan suatu sistem yang dapat mengelolan laporan tersebut (Nirwana, 2018; Palma, 2021; Sutaryo, 2020).

Fungsi pengawasan penyelenggaraan suatu pemerintahan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang memiliki tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan dari daerah diberikan kepada Inspektorat Daerah untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah juga melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Wasis Prabowo, akuntabilitas keuangan di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan. Salah satu bentuk permasalahannya yaitu permasalahan *fraud*. Pengelolaan laporan keuangan terkait aset desa masih perlu penguatan baik secara administrasi maupun hukum. Disamping itu, kenaikan tingkat kemiskinan masih terjadi dalam kurun waktu Maret hingga Desember 2022.

Sistem Informasi Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa suatu pemerintahan baik pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi informasi untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan

untuk membangun manajemen informasi yang lebih efektif dan efisien serta mampu menyederhanakan akses antar unit kerja dan menjadikan suatu pemerintahan bekerja secara terpadu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan. Salah satunya dengan menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan nagari. Perangkat nagari tentunya dituntut tanggung jawab yang besar dalam menyusun laporan keuangan karena mendapatkan dana nagari dari pemerintah daerah yang perlu dijalankan sesuai dengan anggaran nagari. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, perangkat nagari diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan nagari. Perangkat nagari juga dituntut lebih profesional dalam mengelola keuangan nagari sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merancang suatu aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah. Aplikasi Siskeudes memiliki fitur yang dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingga menjadi keunggulan dari aplikasi tersebut. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Pesisir Selatan pertama kali diimplementasikan pada tahun 2016. Penerapan aplikasi tersebut berkaitan dengan jangkauan jaringan *smarcity* di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana terdapat 60 dari 182 nagari yang sudah terjangkau jaringan internet *Indihome* dan *smartphone* (Yoni Syafrizal, 2019). Siskeudes Online diselenggarakan atau dihosting pada server milik pemerintah daerah dengan *system Remote Desktop Connection* (RDC). Oleh karena itu, aplikasi tersebut hanya bisa diakses oleh nagari melalui jaringan intranet (*smarcity*), maupun melalui koneksi internet lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspekda) Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: keterbatasan jumlah personil tenaga pemeriksaan ke lapangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah nagari. Adanya masalah penyalahgunaan dana nagari oleh Wali Nagari dibuktikan dengan ditemukannya penyalahgunaan dana oleh auditor pengawasan keuangan yang tidak sesuai aturan. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pemerintah nagari dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dan penjelasan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh pengawasan keuangan oleh inspekda terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari melalui pemanfaatan TI sebagai variabel intervening.

## Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Metode penelitian kuantitatif menguji teori dengan melihat bagaimana variabel yang diukur berhubungan satu sama lain, memungkinkan data numerik dan mengevaluasi hasilnya dengan metode statistik. Total responden adalah 52 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan model skala likert (1-5). Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistic 29*.

## Hasil Penelitian

### A. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan landasan mengambil keputusan berdistribusi normal atau tidak berdasarkan skor sig. lebih besar dari  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal jika skor sig. lebih besar dari  $> 0,05$ . Jika skor sig. lebih kecil dari  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal.

**Tabel 1. Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76662244
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.064
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan nilai tabel 4.5 menunjukkan output pada kolom sig. sebesar 0,200. Angka sig yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 29.0 tersebut  $>$  taraf signifikansi 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.

#### 2. Uji Linearitas

Uji linearitas menggunakan test of linearity. Pengujian linearitas ini melihat penyebaran titik jika mengikuti garis lurus diagonal maka memenuhi syarat

linearitas dan dapat digunakan dalam model regresi. Berikut hasil dari uji linearitas dalam penelitian ini:

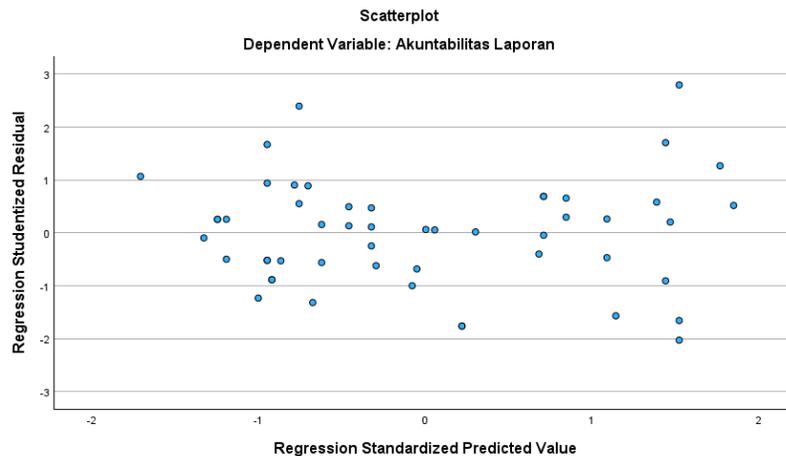
**Tabel 2. Uji Linearitas**

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Betwe en Group s	(Combined)	108.022	11	9.820	1.348	.235
		Linearity	5.203	1	5.203	.714	.403
		Deviation from Linearity	102.819	10	10.282	1.411	.211
Within Groups			291.420	40	7.286		
Total			399.442	51			

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 2, nilai signifikansi variabel akuntabilitas laporan keuangan sebesar  $0,403 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan mencukupi dasar uji linearitas dan dapat digunakan dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat ditentukan berdasarkan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada sebuah model regresi.



**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat titik-titik data menyebar secara acak. Selain itu, persebaran titik berada di bagian atas angka nol atau bagian bawah angka nol dari sumbu vertikal Y dan tidak membentuk pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi yang dihasilkan.

#### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.560	.28080	1.789
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan					
b. Dependent Variable: Y					

Berdasarkan tabel 3, nilai Durbin-Watson sebesar 1.789, hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini karena secara umum keputusan ini berlandaskan pada nilai Durbin-Watson diantara -2 sampai +2 berarti tidak autokorelasi, dan jika angka Durbin-Watson dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi.

#### B. Uji Hipotesis

##### 1. Uji t (Parsial)

Uji ini bertujuan agar dapat melihat pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji t**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.576	.402		46.200	0,001
	Pengawasan Keuangan	.083	.010	.754	8.123	0,001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan						

Berdasarkan tabel 4, variabel pengawasan keuangan memiliki t hitung sebesar 8,123 > 2,008 dan nilai signifikansinya 0,001 < 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa variable pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima.

## 2. Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

**Tabel 5. Path Analysis**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.271	.919		19.881	<.001
	Pengawasan Keuangan	.073	.025	0.440	2.957	.005
	Pemanfaatan TI	.032	.046	0.104	.697	.489

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 5, hasil uji *path analysis* pengaruh langsung pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 0,440. Sedangkan pengaruh tidak langsung pengawasan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,104.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pengawasan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini merujuk bahwa H2 ditolak.

## 3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 6. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.754 <sup>a</sup>	0.569	0.560	2.80800	1.789
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan					
b. Dependent Variable: Y					

Berdasarkan tabel 6. dari hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R 0,754 dan nilai R Square 0,569, sementara nilai Adjust R Square yang dihasilkan 0,560. Dari uji koefisien determinasi dihasilkan kontribusi variabel pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 56 % , sedangkan sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya dari nilai Adjust R Square sebesar 0,560 atau sebesar 56% dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan keuangan oleh Inspekda Kabupaten Pesisir Selatan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari sebesar 56%.

#### 4. Uji Regresi Linear Sederhana

**Tabel 7. Uji Regresi Linear Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.576	.402		46.200	0,001
	Pengawasan Keuangan	0.083	.010	.754	8.123	0,001
a. Dependent Variable: Y						

Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 18.576 + (0,083) X$$

Dengan nilai t hitung sebesar 8,123 dan nilai t tabel sebesar 2,00856, serta signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum (0,05),

dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X dalam model regresi ini signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi yang ditentukan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya variabel pengawasan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan, ini bisa memberi bukti bahwa H1 diterima.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari**

Hasil pengujian variabel pengawasan keuangan memiliki t hitung sebesar  $8,123 > 2,008$  dan nilai signifikansinya  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ditemukan pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dalam hal ini terjadi peningkatan terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel.

Temuan ini didukung oleh pendapat dari T. Hani Handoko (2014) dimana untuk menetapkan standar kinerja, membandingkan hasil kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menilai terjadinya penyimpangan dalam suatu organisasi, serta untuk terjaminnya sumber data yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mengambil tindakan koreksi maka diperlukan suatu kegiatan pengawasan yang mampu mengawasi hal tersebut. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2009) menyampaikan bahwa pengawasan keuangan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Inspektorat daerah dapat melakukan konsultasi dengan perangkat nagari mengenai risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku agar memberikan keyakinan dan terwujudnya akuntabilitas pemerintah nagari, sehingga kegiatan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat berjalan efektif. Akuntabilitas menurut Mahmudi (2010) adalah suatu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat umum untuk mengelola, menyajikan dan membuat laporan terhadap kegiatan yang dijalankan. Bentuk pertanggungjawaban

public yang terkoordinasi dengan baik diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan.

Pencegahan terhadap adanya kesalahan dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku auditor internal yang berperan penting dalam hal pengawasan keuangan. Sebelum laporan keuangan diserahkan kepada Bupati/Wali kota maka dilakukan proses reviu terlebih dahulu terhadap laporan keuangan untuk menelaah ulang bukti kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Reviu laporan keuangan ini juga memerlukan kompetensi auditor yang baik agar tidak terjadi kekeliruan dalam memastikan bukti tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat semakin baik dan jika terdapat rekomendasi atas temuan auditor dapat segera dilakukan tindak lanjut setelah adanya proses reviu. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah nagari dapat diwujudkan melalui peran pengawasan inspektorat daerah sebagai auditor internal.

## **2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memediasi Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan temuan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pengaruh langsung pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan sejumlah 0,440. Sedangkan secara tidak langsung, pengaruh pengawasan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,104, maka maknanya lebih kecil pengaruh secara tidak langsung dibandingkan dengan pengaruh langsung, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pengawasan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, sehingga diambil kesimpulan H2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mubaraq (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana desa. Penelitian Dyah Puri S. dan Bestari (2015) juga menyatakan hal yang sama dengan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemanfaatan TI dan fasilitas yang memadai sudah diterapkan dengan baik, belum mampu mempengaruhi peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Pada masa sekarang, untuk menunjang produktivitas kerja dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Namun, pada umumnya kemajuan teknologi informasi yang sudah tersedia pada suatu instansi pemerintahan tidak dimanfaatkan dengan baik. Bukti dari hasil perhitungan diatas, pemanfaatan TI masih belum dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

Proses pengambilan keputusan dalam organisasi dapat lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memiliki peranan dalam menyediakan informasi yang akurat dan cepat. Pada penelitian ini, pemanfaatan TI tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari. Artinya, tinggi atau rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada suatu satuan kerja, tidak ada pengaruh yang berarti terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bagian dari indikator yang dapat diukur dalam proses pengawasan keuangan, sehingga pengaruhnya tidak begitu signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu instansi pemerintah telah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya, akuntabilitas laporan kinerja belum mampu mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, terdapat pengaruh pengawasan keuangan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari, namun pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dalam memediasi pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari.

## **Daftar Pustaka**

- Abdur Rahim, dkk. 2023. Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9) : 7012-7018.
- Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Padakabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1: 01-15.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2022. *Survei Layanan Unit Desa*. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/5/42809/0/BPKP-Menekankan->

[Pentingnya-Sinergi-dan-Kolaborasi-Serta-Pemanfaatan-Teknologi-Informasi](#)

Diakses pada 20 April 2024.

Faesar Fazlurahman, dkk. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan

Fifit Purnama dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah,

Karimuddin Abdullah, dkk. 2021. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Aceh : Yayasan Penerbit

Muhammad Zaini. 120 hal.

Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual. *Jurnal Akuntabel*, Vol.14: 57-68.

Nabila Azzahra. 2023. Pengawasan Keuangan Nagari Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Laporan Keuangan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,

*Skripsi*. IPDN.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP).

Saputro,E.A. dan Mahmud,A. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap

Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 4(3)

: 1-9.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*

*Krisna* : Kumpulan Riset Akuntansi. Vol.12, Januari 2021: 250-265.

Steffi Zafia F. 2023. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Daerah Dalam

Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Andalas.

Syofian Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenamedia Group. 528 hal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.

Abdullah, M. I. (2022). ANTECEDENTS OF THE ACCOUNTABILITY IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e709>

Andriana. (2021). Disclosing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Financial Management Accountability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 921(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/921/1/012001>

Clarke, M. (2021). Surgical service monitoring and quality control systems at district hospitals in Malawi, Tanzania and Zambia: A mixed-methods study. *BMJ Quality and Safety*, 30(12), 950–960. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-012751>

Nirwana. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>

Palma, E. B. (2021). The multiple dimensions of whistleblower protection: Lessons from the Wirecard case. *Revista Espanola de La Transparencia*, 13, 47–57. <https://doi.org/10.51915/RET.193>

Sutaryo. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.